

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKjIP

KABUPATEN BANGLI 2020



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGLI
TAHUN 2021**



Kata Pengantar

Dengan memanjatkan Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2020 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2020 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Secara substantif Laporan Kinerja ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangli



Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2020 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) semesta berencana Kabupaten Bangli Tahun 2016–2021 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli nomor 7 tahun 2018, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Bangli tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2020 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2021 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Bangli, Maret 2021

BUPATI BANGLI,

SANG NYOMAN SEDANA ARTA, SE



Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2020 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) semesta berencana Kabupaten Bangli Tahun 2016–2021 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli nomor 7 tahun 2018, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Bangli tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2020 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2021 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Bangli, Maret 2021



BUPATI BANGLI,

SANG NYOMAN SEDANA ARTA, SE



Ikhtisar Eksekutif

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Bangli berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan prinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, diujikan dan diandalkan.

Tahun 2020 merupakan tahun Empat dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mencapai Visi, Misi dan tujuan Pembangunan di Pemerintah Kabupaten Bangli.

Visi Kabupaten Bangli merupakan gambaran kondisi masa depan yang di cita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu pada tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

**“Membumikan ajaran Tri Sakti Bung Karno
untuk mewujudkan masyarakat Bangli
yang Gita Shanti”**



Sesuai Visi diatas Pemerintah Kaupaten Bangli menetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Bangli 2016-2021 yang merupakan untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian Visi pembanguan. Adapun Misi Kabupaten Bangli sebagai berikut :

1. Membangkitkan perekonomian lokal
2. Meningkatkan pendapatan asli daerah
3. Pembenahan tata kelola objek wisata
4. Menekan angka pengangguran dan kemiskinan
5. Perbaikan manajemen pendidikan, pariwisata dan lingkungan
6. Penguatan kelembagaan aparatur pemerintah dan masyarakat
7. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, demokratis dan efisien
8. Pengembangan UMKM berbasis ekonomi kreatif
9. Mengembangkan nilai budaya dan kearifan lokal

Dalam RPJMD Kabupaten Bangli terdapat 9 Misi, 10 Tujuan, 16 sasaran, dengan 79 indikator sasaran terdiri dari Misi I terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 12 indikator kinerja, Misi II terdapat 1 tujuan dan 1 sasaran dengan 2 indikator kinerja, Misi III terdapat 1 tujuan dan 2 sasaran dengan 4 indikator kinerja, Misi IV terdapat 1 tujuan dan 3 sasaran dengan 10 indikator kinerja, Misi V terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dengan 10 indikator Kinerja, Misi VI terdapat 1 Tujuan, 2 Sasaran, dengan 7 indikator kinerja, Misi VII terdapat 2 Tujuan, 2 Sasaran dengan 22 Indikator, Misi VIII terdapat 1 Tujuan 1 Sasaran dengan 8 Indikator dan Misi IX terdapat 1 Tujuan, 1 Sasaran dan 4 indikator kinerja. Dari 16 sasaran dengan 79 indikator kinerja.



Mengacu pada Peraturan Bupati Bangli Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Bangli, maka sasaran dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Capaian Kinerja sebagai berikut :

- ✓ Misi I terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 12 indikator Sasaran dengan Capaian kinerja 3 dengan kategori Baik sekali, dan 7 indikator dengan kategori Baik serta 2 indikator cukup.
- ✓ Misi II terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 2 indikator Sasaran dengan capaian kinerja kategori kurang.
- ✓ Misi III terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator Sasaran dengan 1 Baik Sekali dan 3 Indikator cukup.
- ✓ Misi IV terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 10 indikator Sasaran dengan capaian Kinerja dengan kategori 5 indikator kategori Baik Sekali, 3 kategori Baik, 1 kategori cukup, 1 kategori kurang.
- ✓ Misi V terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 10 indikator Sasaran dengan capaian kinerja 3 Baik Sekali dan 6 baik dan 1 kurang
- ✓ Misi VI terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 7 indikator Sasaran dengan capaian kinerja 3 Kategori Baik sekali, 3 kategori Baik. dan 1 kurang
- ✓ Misi VII terdapat 2 tujuan, 2 sasaran dan 22 indikator kinerja dengan Capaian Kinerja 6 indikator Baik Sekali. Dan 12 indikator Capaian kinerja kategori Baik, 1 cukup dan 3 belum dirilis.



- ✓ Misi VIII terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 8 indikator kinerja dengan capaian kinerja terdiri 3 indikator Baik Sekali. dan 1 indikator Baik serta 3 indikator cukup dan 1 indikator kurang.
- ✓ Misi IX terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 4 indikator kinerja dengan Capaian Kinerja 1 Baik dan 1 indikator cukup dan 2 indikator kurang.

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 16 sasaran yang mencakup 79 indikator sasaran, di ketahui bahwa 24 indikator sasaran atau 30,9% baik sekali. 41,77% indikator sasaran atau 41,77% Baik, 11 indikator sasaran atau 13,92% Cukup, 8 indikator sasaran atau 10% Kurang dan 3 indikator sasaran atau 3,8% belum dirilis. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 88,86% atau bermakna Baik,

Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bangli pada tahun 2020 dengan predikat Baik, kalau dibandingkan dari capaian kinerja tahun 2019 mengalami penurunan, hal ini disebabkan dengan situasi dan kondisi Covid 19 yang berakibat adanya refocusing anggaran, walau demikian perlu adanya upaya rencana aksi terhadap indikator kinerja berdasarkan skala prioritas yang mendukung capaian kinerja Kabupaten Bangli yang lebih baik.



Daftar isi

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Sejarah Singkat Kabupaten Bangli	2
1.4. Kondisi Geografis Daerah	3
1.4.1. Batas Administrasi	3
1.4.2. Luas Wilayah	4
1.4.3. Topografi	4
1.5. Gambaran Umum Demografi	5
Jumlah Penduduk	5
1.6. Kondisi Ekonomi Daerah	6
1.7. Bidang Kewenangan	8
1.8. Jumlah Pegawai Negeri Sipil	9
1.9. Sistematika Penyajian LKjIP	10
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	10
2.1. Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021	11
2.1.1. Penjelasan Visi	12
2.1.2. Penjelasan Misi	13
2.1.3. Tujuan, Sasaran dan indikator Kinerja	14
2.1.4. Strategi dan Arah Kebijakan	17
2.1.5. Indikator Kinerja Utama	23
2.1.6. Rencana Kerja Tahunan	30
2.1.7. Perjanjian Kinerja	37



BAB III Akuntabilitas Kinerja	45
3.1. Capaian Kinerja.....	45
3.2. Analisis Capaian Kinerja.....	50
3.3. Akuntabilitas Keuangan	66
BAB IV Penutup.....	68

Lampiran :

- Pernyataan telah direviu inspektorat Kabupaten Bangli.
- Tanda Penghargaan yang diterima Kabupaten Bangli.



Daftar Tabel

Tabel 1.1	Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Per Per Kecamatan di Kabupaten Bangli	6
Tabel 1.2	PDRB Kabupaten Bangli	7
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Negeri Sipil	9
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Misi.....	14
Tabel 2.2	Tujuan Prioritas, Strategi	19
Tabel 2.3	Indikator Kerja Utama	24
Tabel 2.4	Rencana Kinerja Tahunan	31
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja.....	38
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	46
Tabel 3.2.1	Analisis Pencapaian Sasaran 1	51
Tabel 3.2.2	Analisis Pencapaian Sasaran 2	52
Tabel 3.2.3	Analisis Pencapaian Sasaran 3	53
Tabel 3.2.4	Analisis Pencapaian Sasaran 4	53
Tabel 3.2.5	Analisis Pencapaian Sasaran 5	54
Tabel 3.2.6	Analisis Pencapaian Sasaran 6	55
Tabel 3.2.7	Analisis Pencapaian Sasaran 7	55
Tabel 3.2.8	Analisis Pencapaian Sasaran 8	56
Tabel 3.2.9	Analisis Pencapaian Sasaran 9.....	57
Tabel 3.2.10	Analisis Pencapaian Sasaran 10.....	58
Tabel 3.2.11	Analisis Pencapaian Sasaran 11.....	59
Tabel 3.2.12	Analisis Pencapaian Sasaran 12	60
Tabel 3.2.13	Analisis Pencapaian Sasaran 13.....	60
Tabel 3.2.14	Analisis Pencapaian Sasaran 14.....	63
Tabel 3.2.15	Analisis Pencapaian Sasaran 15.....	63
Tabel 3.2.16	Analisis Pencapaian Sasaran 16.....	65
Tabel 3.3.1	Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bangli	67





BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Bangli.

Proses penyusunan LKjIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Bangli. LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Mengacu kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKjIP tingkat pemerintah provinsi disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.



1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Bangli. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKjIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKjIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik, selain itu LKjIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

1.3. Sejarah Singkat Kabupaten Bangli

Menurut Prasasti Pura Kehen kini tersimpan di Pura Kehen, diceritakan bahwa pada zaman silam di Desa Bangli berkembang wabah penyakit yang disebut kegeringan yang menyebabkan banyak penduduk meninggal. Penduduk lainnya yang masih hidup dan sehat menjadi ketakutan setengah mati, sehingga mereka berbondong-bondong meninggalkan desa guna menghindari wabah tersebut. Akibatnya Desa Bangli menjadi kosong karena tidak ada seorangpun yang berani tinggal disana. Raja Ida Bhatara Guru Sri Adikunti Ketana yang bertahta kala itu dengan segala upaya berusaha mengatasi wabah tersebut. Setelah keadaan pulih kembali sang raja yang kala itu bertahta pada tahun Caka 1126, tanggal 10 tahun Paro Terang, hari pasaran Maula, Kliwon, Chandra (senin), Wuku Klurut tepatnya tanggal 10 Mei 1204, memerintahkan kepada putra-putrinya yang bernama Dhana Dewi Ketu agar mengajak penduduk ke Desa Bangli guna bersama-sama membangun memperbaiki rumahnya masing-masing sekaligus menyelenggarakan upacara/yadnya pada bulan



Kasa, Karo, katiga, Kapat, Kalima, Kalima, Kanem, Kapitu, kaulu, Kasanga, Kadasa, Yjahstha dan Sadha. Disamping itu beliau memerintahkan kepada seluruh penduduk agar menambah keturunan di wilayah Pura Loka Serana di Desa Bangli dan mengizinkan membabat hutan untuk membuat sawah dan saluran air. Untuk itu pada setiap upacara besar penduduk yang ada di Desa Bangli harus sembahyang. Pada saat itu juga, tanggal 10 Mei 1204, Raja Idha Bhatara Guru Sri Adikunti Katana mengucapkan pemastu yaitu:

“Barang siapa yang tidak tunduk dan melanggar perintah, semoga orang itu disambar petir tanpa hujan atau mendadak jatuh dari titian tanpa sebab, mata buta tanpa catok, setelah mati arwahnya disiksa oleh Yamabala, dilempar dari langit turun jatuh ke dalam api neraka.”

Bertitik tolak dari titah-titah Sang Raja yang dikeluarkan pada tanggal 10 Mei 1204, maka pada tanggal 10 Mei setiap tahun ditetapkan sebagai hari lahirnya Kota Bangli.

1.4. Kondisi Geografis Daerah

1.4.1. Batas Administrasi

Secara geografis Kabupaten Bangli merupakan satu-satunya wilayah kabupaten di Provinsi Bali yang tidak memiliki pantai dengan dengan luas 52.081 Ha atau 9,24% dari luas wilayah Provinsi Bali (563.666 Ha) yang terletak pada koordinat 08°3'40" - 08°50'48" LS (lintang selatan) dan 114°25'53" - 115°42'40" BT (Bujur Timur) dan di batasi oleh lima Kabupaten lainnya di Bali dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Wilayah Kab. Buleleng
- Sebelah Timur : Wilayah Kab. Karangasem dan Kab. Klungkung
- Sebelah Selatan : Wilayah Kab. Gianyar
- Sebelah Barat : Wilayah Kab. Gianyar, Kabupaten Badung dan Kab. Buleleng



1.4.2. Luas Wilayah

Secara administrasi Kabupaten Bangli, terbagi menjadi 4 wilayah kecamatan dan 68 desa dan 4 kelurahan yaitu : Kecamatan Susut (9 Desa), Kecamatan Bangli (4 Kelurahan dan 5 Desa), Kecamatan Tembuku (6 Desa) dan Kecamatan Kintamani (48 Desa). Luas wilayah Kabupaten Bangli adalah 52.081 Ha atau 9,24% dari luas wilayah Provinsi Bali (563.666 Ha). Ibukota Kabupaten Bangli adalah Kawasan Perkotaan Bangli, meliputi Kelurahan Kubu, Kelurahan Cempaga, Kelurahan Kawan dan Kelurahan Bebalang. Data administrasi wilayah, jumlah desa dan luas wilayah dapat dilihat pada Tabel 2.1, Tabel 2.2. dan Gambar 2.1. Tabel 2.1 Administrasi Wilayah Kabupaten Bangli Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa luas wilayah Kecamatan Kintamani adalah 70,45% dari luas wilayah Kabupaten dan bahkan merupakan kecamatan terluas di Provinsi Bali (6,51% dari luas wilayah Provinsi Bali), lebih besar dari luas wilayah Kabupaten Klungkung (31.500 Ha) dan hampir sama dengan luas wilayah Kabupaten Gianyar (36.800 Luas wilayah Kabupaten Bangli sebesar 520,81 km² atau 9,25 % dari luas wilayah Provinsi Bali.

1.4.3. Topografi

Topografi wilayah Kabupaten Bangli berada pada ketinggian antara 100–2.152 mdpl, dengan puncak tertinggi adalah Puncak Penulisan. Secara umum rentang ketinggian wilayah Kecamatan Susut (225–950 mdpl), Kecamatan Bangli (200–1.175 mdpl), Kecamatan Tembuku (300–891 mdpl) dan Kecamatan Kintamani (100–2.152 mdpl). Kelerengan wilayah bervariasi antar wilayah kecamatan dan secara umum berada pada kondisi dataran sampai landai (0-15 persen) seluas 12,11 persen dari luas wilayah, bergelombang (15-30 persen) seluas 21,70 persen dari luas wilayah,



curam (30-40 persen) seluas 18,18 persen dari luas wilayah dan sangat curam (lebih dari 40 persen) seluas 48,01 persen luas wilayah. Kondisi datar relatif hanya terdapat pada kawasan kaki Gunung Batur, landai dan bergelombang pada wilayah Kecamatan Susut, Bangli dan Tembuku sedangkan bergelombang dan curam serta sangat curam pada wilayah Kecamatan Kintamani. Hidrologi wilayah terdiri dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan terdiri dari Danau Batur dan beberapa sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Bangli.

1.5. Gambaran Umum Demografi

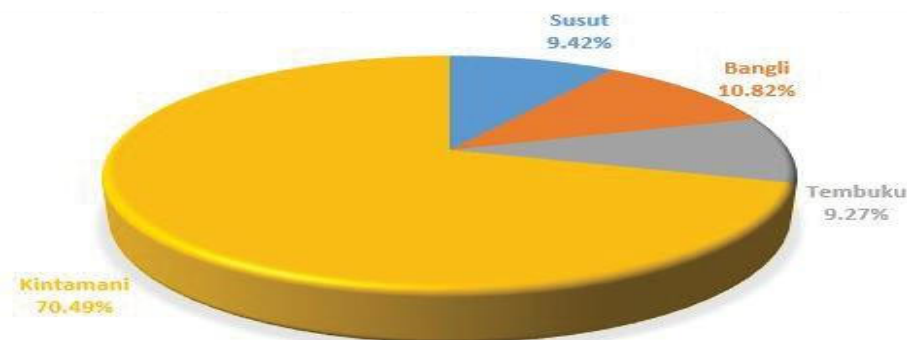
Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk dan KK Keseluruhan Penduduk pada dasarnya bisa dilihat dari dua sisi yaitu penduduk sebagai beban pembangunan dan potensi pembangunan. Penduduk sebagai beban pembangunan karena ketidak seimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi, sedangkan penduduk sebagai potensi pembangunan akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan itu sendiri karena dengan adanya penduduk yang besar akan menciptakan permintaan sehingga secara kumulatif berdampak positif terhadap kegiatan pembangunan yang dapat mendorong kesejahteraan masyarakat. Dokumen RPI2JM Kab. Bangli 2018-2022 II-10 Data kependudukan merupakan salah satu sumber informasi untuk suatu kegiatan perencanaan. Dengan adanya informasi data kependudukan tersebut, rancangan suatu perencanaan dapat terukur dengan baik dari sisi target sasaran serta dampak atau outcome, yang diharapkan. Pada hakekatnya pengertian penduduk lebih ditekankan pada komposisi penduduk. Pengertian ini mempunyai arti yang sangat luas; tidak hanya meliputi pengertian umur, jenis kelamin dan lainnya, tetapi juga klasifikasi ketenaga kerjaan, tingkat pendidikan, agama, ciri sosial, dan angka statistik lainnya yang menyatakan distribusi frekuensi. Selain itu



komposisi penduduk juga menyatakan pergerakan sosial yang memperlihatkan perubahan status penduduk. Perubahan ini tidak hanya melalui pertambahan secara alami tetapi juga melalui berbagai kegiatan ekonomi dan sosial. Menurut BPS, Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar wilayah masuk disuatu wilayah menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk di wilayah yang bersangkutan. Sedangkan kematian dan perpindahan penduduk ke wilayah lain menyebabkan berkurangnya jumlah penduduk di wilayah tersebut. Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Di Kabupaten Bangli Tahun 2016 Kec. Susut Kec. Bangli Kec. Tembuku Kec. Kintamani Jumlah 44.410 50.880 34.710 93.800 Jumlah total 223.800 Sumber Data : Bangli Dalam Angka 2017 Tabel 2.4 Jumlah Kepala Keluarga Di Kabupaten Bangli Tahun 2016 Kec. Susut Kec. Bangli Kec. Tembuku Kec. Kintamani Jumlah 13.521 14.747 10.569 28.561 Jumlah total 67.038 Sumber Data : Bangli Dalam Angka 2017

Tabel 1.1
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Per
Per Kecamatan di Kabupaten Bangli





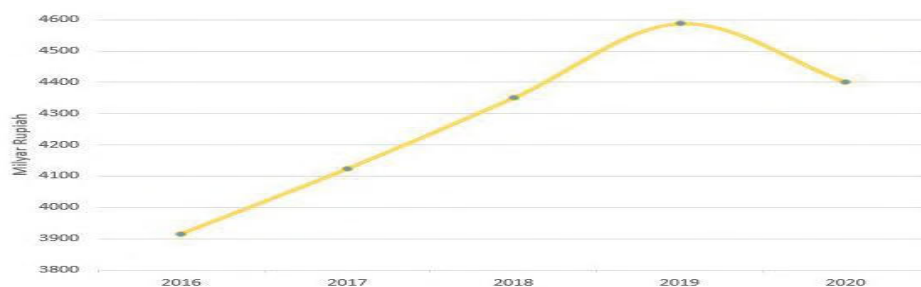
1.6. Kondisi Ekonomi Daerah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran mengenai keadaan perekonomian suatu daerah. Demikian halnya perkembangan perekonomian di Kabupaten Bangli ditunjukkan dengan perkembangan PDRB -nya.

Secara komulatif pertumbuhan ekonomi Bangli pada tahun 2020 mencapai kontraksi sebesar 4,10 persen.

Struktur ekonomi Kabupaten Bangli ditunjukkan dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), pada tahun 2020 masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 1 865,12 miliar rupiah atau sekitar (27,75 persen) dari jumlah total kabupaten sebesar 6 721,98 milyar rupiah. Sektor ini mempengaruhi hampir sepertiga nilai PDRB Kabupaten Bangli. Perkembangan PDRB harga berlaku mengalami penurunan sebesar (3,88) persen yaitu 6 993,42 miliar rupiah di tahun 2019 menjadi 6 721,98 miliar rupiah di tahun 2020. Besaran PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2020 mencapai 4 399,72 miliar rupiah, lebih rendah dibanding kan tahun 2019 yaitu sebesar 187,91 miliar rupiah.

Tabel. 1.2
PDRB Kabupaten Bangli



Sumber Data BPS Kab Bangli

1.7. Bidang Kewenangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah No 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah, serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor, 50, 51, 52, 53 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan, yang terbagi dalam urusan Wajib dan urusan pilihan meliputi :

- 1 Sekretariat Daerah
- 2 Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah
- 3 Inspektorat Daerah
- 4 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
- 5 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 6 Dinas Kesehatan
- 7 Dinas Sosial
- 8 Dinas Perhubungan
- 9 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 10 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- 11 Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 12 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 13 Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
- 14 Dinas Lingkungan Hidup
- 15 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandialian



- 16 Dinas Pengendalian Penduduk ,KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 17 Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa
- 18 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 19 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 20 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
- 21 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- 22 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
- 23 Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- 24 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 25 Rumah Sakit Umum Daerah Bangli
- 26 Kecamatan Bangli
- 27 Kecamatan Susut
- 28 Kecamatan Tembuku
- 29 Kecamatan Kintamani

1.8. Jumlah Aparatur Sipil Negara.

Untuk mendukung penyelenggaraan urusan Tata Kelola Pemerintahan yang baik sangat tergantung Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dengan melalui Penjenjangan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Adapun jumlah ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Aparatur
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli
Berdasarkan Data Simpeg Tahun 2020

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	41
2	SMP	123
3	SLTA	1316
4	D1	28
5	D2	141
6	D3	468
7	S1/D4	2344
8	S2	241
9	S3	1



	Jumlah ASN	4703
1	Eselon I	-
2	Eselon II	30
3	Eselon III	124
4	Eselon IV	413
5	Eselon V	11
	Jumlah Pejabat Struktural	578
	Jabatan fungsional Tertentu	2250
	Jabatan fungsional Umum	1867

1.9. Sistematika Penyajian LKjIP

Bab I : Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, sejarah Pemerintah Kabupaten Bangli, kondisi geografis, data demografi, serta sistematika penyajian.

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Memuat Pengelolaan Kinerja Daerah, Rencana Strategis Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja tahun 2020.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kab Bangli

Berisi penjelasan singkat tentang Capaian Sasaran Strategis tahun 2020, juga Evaluasi dan Analisis Capaian Sasaran Stratesis yang diuraikan per Sasaran dan Kinerja Keuangan Daerah.

Bab IV : Penutup

Berisi ringkasan dan kesimpulan terkait pencapaian kinerja dan pemanfaatannya untuk umpan balik dalam perencanaan pembangunan daerah.





BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021

Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

RPJMD Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.



2.1.1. Penjelasan Visi

Berdasarkan kondisi Kabupaten Bangli dewasa ini, serta peluang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang, pasangan Bupati Bangli dan Wakil Bupati Bangli I MADE GIANYAR, M.Hum dan SANG NYOMAN SEDANA ARTHA, SE membuat Visi Kabupaten Bangli tahun 2016-2021 sebagai berikut:

“MEMBUMIKAN AJARAN TRI SAKTI BUNG KARNO UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT BANGLI YANG GITA SHANTI”

Penjelasan Visi.

Untuk lebih memahami akan makna dari Visi tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut:

- 1) **MEMBUMIKAN** bermakna mewujudkan dalam sikap atau pendirian pada kehidupan sehari-hari.
- 2) **AJARAN** berarti segala sesuatu yang diajarkan, nasihat, petuah, petunjuk, senantiasa memegang teguh. Pemerintah Kabupaten Bangli.
- 3) **TRI SAKTI BUNG KARNO** merupakan tiga kekuatan yang harus diwujudkan yakni berdaulat dibidang politik, berdikari dibidang ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan.
- 4) **MASYARAKAT BANGLI** merupakan seluruh insan manusia yang tinggal dalam wilayah Kabupaten Bangli.



- 5) **GITA SHANTI** terdiri dari dua suku kata "**Gita**" memiliki makna nyanyian, lagu, puja, atau sesuatu yang dicita-citakan. Sedangkan "**Shanti**" bermakna kedamaian atau kondisi idaman semua insan dengan selalu mengikuti petunjuk atau ajaran suci Tuhan Yang Maha Esa. Jadi **Gita Shanti** adalah cita-cita untuk mewujudkan kedamaian

2.1.2 Pejelasan Misi

Perwujudan visi pembangunan Kabupaten Bangli ditempuh melalui misi pembangunan daerah. Misi merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan.

Guna mewujudkan visi "**Membumikan ajaran Tri Sakti Bung Karno untuk mewujudkan masyarakat Bangli yang Gita Shanti**" di atas, maka ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Bangli 2016-2021, sebagai berikut:

- 1) Membangkitkan perekonomian lokal
- 2) Meningkatkan pendapatan asli daerah
- 3) Pembenahan tata kelola objek wisata
- 4) Menekan angka pengangguran dan kemiskinan
- 5) Perbaikan manajemen pendidikan, pariwisata dan lingkungan
- 6) Penguatan kelembagaan aparatur pemerintah dan masyarakat
- 7) Mewujudkan pemerintahan yang bersih, demokratis dan efisien
- 8) Pengembangan UMKM berbasis ekonomi kreatif
- 9) Mengembangkan nilai budaya dan kearifan lokal



2.1.3 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja.

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Bangli 2016 - 2021 ditetapkan 9 (Sembilan) tujuan , 17 sasaran dan yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Misi Kabupaten Bangli

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatkan prokduktivitas pertanian dan perikanan melalui pemanfaatan tanah, pemberdayaan masyarakat desa guna ketahanan pangan dan prokduktivitas perekonomian local	Meningkatnya prokduktivitas pertanian dan perikanan guna ketahanan pangan	- Produksi Ikan Per hektar (ton)
			Produksi Daging (Ton)
			- Presentase Klp Tani yang meningkat kals kemampuannya
			- Presentase petani dengan pendapatan minimal 2 juta
			- Presentase produksi beras dikonsumsi sendiri
			- Persentase pola pangan Harapan
			- Produktivitas Tanaman Pangan unggulan perhektar
			- Produktivitas Tanaman hortikultura unggulan perhektar
			- Produktivitas Tanaman perkebunan unggulan perhektar (ton)
			- Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa guna mendukung produktivitas perekonomian local	- Presentase masyarakat desa dalam membangun desa
			- Presentase peningkatan jumlah LPD Sehat
			- Presentase Kelembagaan Ekonomi Pedesaan
2	Meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah	Meningkatnya pendapatan asli daerah	- Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) per tahun
			- Jumlah PAD sector Pariwisata
3	Meningkatkan kualitas infrastruktur guna mendukung tata kelola Daya Tarik Wisata (DTW)	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar guna mendukung tata kelola Daya Tarik Wisata (DTW)	- Presentase pengendalian ruang



			- Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap
			Persentase Pembangunan Jalan dan Jembatan
			Persentase Penduduk (RT/KK) yang mempunyai akses air minum
		Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan komunikasi dan informatika guna mendukung tata kelola Daya Tarik Wisata (DTW)	Persentase Pelanggaran lalin
4	Menurunkan angka kemiskinan melalui kesehatan dan layanan sosial lainnya	Menurunnya angka kemiskinan	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja
			Persentase KK/Masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah layak huni
			Umur Harapan Hidup
		Meningkatnya cakupan layanan Kesehatan	Persentase Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit
			Persentase penduduk memiliki dokumen kependudukan dan capil
		Meningkatnya cakupan layanan sosial dasar	Jumlah KDRT yang tertangani
			Persentase PUS yang menjadi peserta KB aktif
			Persentase PMKS yang menerima jaminan Sosial
			Meningkatnya perlindungan ketenagakerjaan
			Meningkatnya jumlah transmigran
5	Meningkatkan manajemen pendidikan, dan pariwisata yang berwawasan lingkungan	Meningkatnya manajemen pendidikan, dan pariwisata	- Jumlah pemustaka
			- Angka Melek Huruf
			- APK PAUD
			- Cakupan layanan Pendidikan 9 tahun
			- Cakupan peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan
			- Cakupan peningkatan mutu manajemen pelayanan Pendidikan
		Meningkatnya manajemen lingkungan	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
6	Meningkatkan kelembagaan aparatur pemerintah dan adat	Meningkatnya kelembagaan aparatur pemerintah	- Persentase Pejabat yang telah memenuhi persyaratan Pendidikan pelatihan kepemimpinan
			- Pelayanan administrasi kepegawaian sesuai SOP
			- Persentase aparatur dan media yang bekerjasama



			- Persentase peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah
			- Jumlah system pengadaan langsung yang kredibel
			- Persentase ormas yang aktif dalam penguatan persatuan dan kesatuan bangsa
		Meningkatnya kelembagaan Desa Dinas, Desa Adat/ Desa Pekraman dan Banjar Adat/banjar pakraman	- Jumlah Desa yang meningkat kesadaran Hukum dan Hamnya
			- Persentase Kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan Desa
			- Pelayanan Administrasi kepegawaian sesuai SOP
			- Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa
7	Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	- Nilai Pengamanan SPBE
			- Nilai SPBE
			- Nilai LPPD
			- Presentase Perangkat Daerah yang melaporkan realisasi fisik dan keuangan kegiatan pembangunan tepat waktu
			- Peningkatan PPID
			- Persentase peningkatan Pengadaan barang jasa
			- Jumlah evaluasi dan laporan pengadaan barang/jasa
			- Persentase perangkat daerah yang mendapat nilai >B
			- Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti
			- Level maturitas SPIP
			- Level Kapabilitas APIP
	Meningkatkan Demokratisasi masyarakat Bangli	Meningkatnya Demokratisasi masyarakat Bangli	- Penegakan PERDA dan Perkada
8	Meningkatkan Kualitas Koperasi, UMKM, Penanaman Modal, perindustri dan perdagangan	Meningkatnya Kinerja Koperasi, UMKM, Penanaman Modal, Perindustrian dan perdagangan	- Meningkatnya kualitas Koperasi
			- Nilai investasi (miliar)
			- Meningkatnya daya saing UMKM
			- Persentase sector industry terhadap PDRB
			- Cakupan Bina Kelompok Pengrajin
			- Persentase kontribusi sector perdagangan



			terhadap PDRB
			- Exsport bersih perdagangan
9	Melestarikan nilai budaya dan kearifan lokal	Meningkatnya nilai budaya dan kearifan lokal	- persentase pengembangan seni dan budaya Daerah
			- Persentase rangkaian upacara keagamaan yang dilaksanakan
			- Persentase cagar budaya yang lestari
			- Presentase Desa Adat yang lestari

2.1.4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Perencanaan strategik selain mengagendakan aktivitas pembangunan, juga mengakomodasi segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat yang dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategyfocussed-management*). Sedangkan arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.



Tema Pembangunan berdasarkan arah kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2016: Memantapkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik dengan Dukungan Masyarakat untuk Memperkuat Daya Saing Daerah.
2. Tahun 2017: Melalui Gerakan Revolusi Mental Kita Tingkatkan Pengelolaan Kemampuan Daerah, Keterpaduan dan Semangat Bekerja Menuju Bangli yang Gita Shanti
3. Tahun 2018: Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Dengan Penguatan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar.
4. Tahun 2019: Pemantapan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan Dengan Memperhatikan Budaya dan Kearifan Lokal
5. Tahun 2020: Peningkatan Kreatifitas dan Inovasi Daerah Menuju Bangli yang Unggul di Segala Bidang.
6. Tahun 2021: Optimalisasi Hasil Pembangunan Untuk Masyarakat Bangli yang Gita Shanti

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bangli Tahun 2016-2021, yang dilaksanakan melalui 9 (sembilan) misi, agar lebih terarah dalam mencapai 10 tujuan dan 16 sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu 2016-2021 per misi, adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2
Tujuan Prioritas, Strategi, Arah Kebijakan
Pembangunan Kabupaten Bangli.

Visi :Membumikan ajaran Tri Sakti Bung Karno untuk mewujudkan masyarakat Bangli yang Gita Shanti				
Misi 1: Membangkitkan perekonomian local				
No	Tujuan Prioritas	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan prokduktivitas pertanian dan perikanan melalui pemberdayaan masyarakat desa guna ketahanan pangan dan prokduktivitas perekonomian local	- Meningkatnya prokduktivitas pertanian dan perikanan guna ketahanan pangan - Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa guna prokduktivitas perekonomian local	- Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dan perikanan guna ketahanan pangan - Penguatan perekonomian desa dan pemberdayaan masyarakat desa.	- Melakukan penelitian dan pengembangan guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian dalam rangka kedaulatan pangan - Memetakan potensi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan - Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil potensi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan termasuk sayuran - Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil potensi kelapa sebagai perkebunan unggulan - Meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil potensi sapi bali, babi bali, itik bali dan ayam bali - Memperkuat peningkatan ketahanan pangan melalui perlindungan sawah, perlindungan sumber daya air, kesuburan tanah, dan akses produksi - Meningkatkan produksi buah lokal, seperti sawo, wani dan lain sebagainya. - Mengaktifkan sekee manyi - Memperkuat kelembagaan Subak - Mempertegas peningkatan kedaulatan beras - Mengembangkan kelestarian pertanian Tanaman Bumi Banten - Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa. - Pengembangan kerajinan tenun di pedesaan dan perkotaan



Visi : Membumikan ajaran Tri Sakti Bung Karno untuk mewujudkan masyarakat Bangli yang Gita Shanti				
Misi 2 : Meningkatkan pendapatan asli daerah				
No	Tujuan Prioritas	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD	- Pemetaan dan penggalan potensi PAD - Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi - Meningkatkan Pengendalian Perijinan
Visi : Membumikan ajaran Tri Sakti Bung Karno untuk mewujudkan masyarakat Bangli yang Gita Shanti				
Misi 3 : Pembenahan tata kelola objek wisata				
No	Tujuan Prioritas	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kualitas infrastruktur guna mendukung tata kelola Daya Tarik Wisata (DTW)	- Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar guna mendukung tata kelola Daya Tarik Wisata (DTW) - Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan, komunikasi dan informatika guna mendukung tata kelola Daya Tarik Wisata (DTW)	- pembangunan, peningkatan infrastruktur penunjang objek wisata - Peningkatan kualitas pengelolaan tata ruang dan objek wisata - Peningkatan ketersediaan dan kualitas fasilitas perhubungan, pengelolaan komunikasi dan informatika	- Meningkatkan kuantitas maupun kualitas sarana dan prasarana penunjang Daya Tarik Wisata (DTW) - Meningkatkan pelestarian panorama alam dan daerah tujuan wisata - Melakukan rehabilitasi daerah kritis dalam berbagai aspeknya, tahura dan daerah terbuka hijau, reboisasi dan penghijauan - Meningkatkan kualitas tataruang dan kuantitas Daya Tarik Wisata (DTW) - Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perhubungan, komunikasi dan informatika
Visi : Membumikan ajaran Tri Sakti Bung Karno untuk mewujudkan masyarakat Bangli yang Gita Shanti				
Misi 4 : Menekan angka pengangguran dan kemiskinan				
No	Tujuan Prioritas	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
1	Menurunkan angka kemiskinan melalui kesehatan dan layanan sosial lainnya	- Menurunnya angka kemiskinan - Meningkatnya cakupan layanan kesehatan - Meningkatnya cakupan layanan sosial dasar	- Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin - Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan - Peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan sosial	- Memastikan jaminan sosial - Membangun kerjasama dan memperkuat hubungan dunia usaha dan potensi lokal - Peningkatan Gerakan Pembangunan Desa Sistem Gotong Royong (Gerbangdesigot) dan Gerakan pembangunan Sistem Gotong Royong Kota (Gerbangsigota) - Membina dan memberdayakan organisasi perempuan - Melakukan peningkatan pembangunan Rumah Layak Huni (Bedah Rumah) - Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan - Peningkatan akses kesehatan melalui Poskesdes, Polindes dan Pustu - Meningkatkan pelayanan kesehatan khususnya pada penduduk yang kurang mampu - Meningkatkan kesadaran



				masyarakat akan PHBS • Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak • Meningkatkan pembinaan kepesertaan dan kemandirian berKB • Meningkatkan penanganan terhadap fakir miskin dan PMKS • Meningkatkan minat dan kualitas para calon transmigran • Meningkatkan tertib administrasi umum
Visi : Membumikan ajaran Tri Sakti Bung Karno untuk mewujudkan masyarakat Bangli yang Gita Shanti				
Misi 5 : Perbaikan manajemen pendidikan, pariwisata dan lingkungan				
No	Tujuan Prioritas	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
1	• Meningkatkan manajemen pendidikan, dan pariwisata yang berwawasan lingkungan	• Meningkatnya manajemen pendidikan, dan pariwisata • Meningkatnya manajemen lingkungan	• Meningkatkan akses layanan pendidikan dan pariwisata • Peningkatan cakupan pengelolaan, penataan lingkungan hidup dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan	• Memantapkan pemenuhan kebutuhan PAUD/TK • Memantapkan pemenuhan kebutuhan Dikdas dan Wajar 9 Tahun • Mendukung Wajar 12 tahun • Meningkatkan tatakelola perpustakaan dan arsip • Meningkatkan pembinaan dan kualitas sarana prasarana olahraga • Mengembangkan destinasi wisata baru: Wisata Agro, Wisata Spiritual, Wisata Alam dll • Pengembangan SDM Pariwisata dengan melibatkan desa adat. • Meningkatkan kelestarian lingkungan termasuk pengendalian pemanfaatan danau • Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengamankan pelestarian daerah tangkapan air, resapan air, daerah cadangan air, sempadan (jalan, sungai, jurang, danau), daerah perlindungan jurang
Visi :Membumikan ajaran Tri Sakti Bung Karno untuk mewujudkan masyarakat Bangli yang Gita Shanti				
Misi 6 : Penguatan kelembagaan aparatur pemerintah dan masyarakat				
No	Tujuan Prioritas	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
1	• Meningkatkan kelembagaan aparatur pemerintah dan adat	• Meningkatnya kelembagaan aparatur pemerintah • Meningkatnya kelembagaan Desa Dinas, Desa Adat/Desa Pekraman dan Banjar Adat/Banjar	• Peningkatan kesesuaian struktur organisasi perangkat daerah dengan kebutuhan daerah • Peningkatan SDM Aparatur Desa, Desa Adat/Desa	• Penguatan keberadaan Desa Adat • Meningkatkan kesesuaian struktur organisasi perangkat daerah dengan kebutuhan daerah • Meningkatkan koordinasi antar organisasi perangkat daerah • Meningkatkan sumber daya aparatur desa dan kelurahan



		Pekraman	Pekraman dan Banjar Adat/Banjar Pekraman	Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara
--	--	----------	--	--

Visi Shanti :Membumikan ajaran Tri Sakti Bung Karno untuk mewujudkan masyarakat Bangli yang Gita

Misi 7 : Mewujudkan pemerintahan yang bersih, demokratis dan efisien

No	Tujuan Prioritas	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
1	- Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah - Meningkatkan demokratisasi masyarakat Bangli	- Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah - Meningkatnya demokratisasi masyarakat Bangli	- Peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel - Peningkatan kualitas dan kuantitas data/informasi pendukung pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan - Peningkatan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat - Penguatan sistem inovasi dan pengembangan IPTEK strategis daerah	- Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah dari tingkat desa hingga kabupaten - Meningkatkan profesionalisme aparat pemerintah, mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, sampai dengan Desa - Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah - Melibatkan masyarakat dan lembaga-lembaga adat sejak awal, berkaitan dengan pembuatan ataupun sosialisasi produk-produk hukum - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ketenteraman, ketertiban umum - Meningkatkan kesadaran masyarakat Bangli untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. - Mengembangkan Inovasi dan teknologi tepat guna

Visi Shanti :Membumikan ajaran Tri Sakti Bung Karno untuk mewujudkan masyarakat Bangli yang Gita

Misi 8 : Pengembangan UMKM berbasis ekonomi kreatif

No	Tujuan Prioritas	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan kualitas Koperasi, UMKM, Penanaman Modal, Perindustrian dan perdagangan	Meningkatnya kinerja Koperasi, UMKM, Penanaman Modal, Perindustrian dan perdagangan	- Peningkatan produktivitas kualitas Koperasi dan UMKM. - Peningkatan produktivitas usaha berbasis ekonomi kreatif	- Meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi dan UMKM - Mengembangkan industri unggulan daerah yang potensial. - Meningkatkan kemitraan pemasaran hasil industri kecil dan menengah

Visi Shanti :Membumikan ajaran Tri Sakti Bung Karno untuk mewujudkan masyarakat Bangli yang Gita

Misi 9: Mengembangkan nilai budaya dan kearifan lokal

No	Tujuan Prioritas	Sasaran Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan nilai budaya dan kearifan lokal	Meningkatnya nilai budaya dan kearifan lokal	- Pelestarian seni dan budaya daerah - Pengembangan seni dan budaya daerah	- Mengembangkan dan merevitalisasi seni budaya Bali - Merestorasi peninggalan budaya - Merevitalisasi keberadaan Listibya



				• Membangun sarana dan prasarana kesenian • Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan budaya lokal • Memperkuat kelompok dan pelaku seni budaya lokal • Meningkatkan kerukunan antar umat beragama
--	--	--	--	--

2.1.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang telah dijabarkan dalam program prioritas pembangunan Kabupaten Bangli lima tahun mendatang, ditetapkan indikator kinerja daerah. Indikator kinerja ini merupakan kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja daerah. Dalam hal ini, indikator kinerja tersebut digunakan untuk mengetahui apakah kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan bila dibandingkan terhadap hasil perencanaan yang hendak dicapai dapat terpenuhi. Indikator Kinerja Utama ini disusun untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi Pemerintah Kabupaten Bangli yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis.

Capaian kinerja RPJMD setiap tahun diukur dari dimensi akuntabilitas dengan menggunakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sistem Renstra dengan LKjIP-nya dikelola dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas: subsistem perencanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Dalam modul Pengukuran dan Analisis Kinerja disebutkan bahwa pengukuran kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP, yaitu setelah subsistem perencanaan kinerja (Meneg PAN, 2008 : 2). Pengukuran kinerja



merupakan proses membandingkan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan. Pada tahun 2014 Men Pan RB mengeluarkan Peraturan Men Pan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran Indikator Kinerja didasarkan pada Peraturan Men Pan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Sebagai dasar perhitungan indikator kinerja menggunakan Formulasi sebagai berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama.

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Satuan
Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan guna ketahanan pangan	- Konsumsi beras dari produksi sendiri	$\frac{\Sigma \text{produksi beras}}{\Sigma \text{penduduk}} \times 100\%$	%
	Produktivitas Tanaman Pangan		
	- Padi - Jagung		(ton/Ha)



Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Satuan
	- Kedelai	$\frac{\text{Produksi tanaman}}{\text{Luas tanam}}$	
	- Kacang tanah		
	- Ubi Kayu		
	- Ubi Jalar		
	- Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	$\frac{\sum \text{jaringan irigasi kondisi baik}}{\sum \text{jaringan irigasi}} \times 100\%$	%
	- Produksi Ikan	$\sum \text{Produksi}$	Ton
	- Produksi Daging	$\sum \text{Produksi}$	Ton
	- Kelembagaan ekonomi pedesaan	$\frac{\sum \text{peningkatan lembaga ekonomi pedesaan}}{\sum \text{lembaga Ekonomi pedesaan}} \times 100\%$	%
	- Persentase pengetahuan dan keterampilan petani	$\frac{\sum \text{Kelompok tani yang dilatih}}{\sum \text{Kelompok tani}} \times 100\%$	%
Meningkatnya pendapatan asli daerah	- Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) per tahun	$\frac{\text{PAD } n - \text{PAD } n-1}{\text{PAD } n} \times 100\%$	%
	- Persentase pertumbuhan pajak daerah per tahun	$\frac{\text{Pajak } n - \text{Pajak } n-1}{\text{Pajak } n} \times 100\%$	%
	- Persentase wajib pajak melaksanakan kewajiban tepat waktu	$\frac{\text{WP tepat waktu}}{\sum \text{WP}} \times 100\%$	%
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar guna mendukung tata kelola Daya Tarik Wisata (DTW)	- Persentase jalan dalam kondisi baik (%)	$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{Panjang Jalan}} \times 100\%$	%
	- Persentase RT Berakses Air Bersih	$\frac{\sum \text{RT Pengguna Air Bersih}}{\sum \text{seluruh RT}} \times 100\%$	%
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan, komunikasi dan informatika guna mendukung tata kelola Daya Tarik	- Persentase pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas	$\frac{\sum \text{pelanggaran \& kecelakaan lalin}}{\sum \text{Kendaraan}} \times 100\%$	%



Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Satuan
Wisata (DTW)	- Persentase pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	$\frac{\sum \text{PD yang sudah terpasang jaringan IT Kabupaten}}{\sum \text{PD}} \times 100\%$	%
Menurunnya angka kemiskinan	- Angka kemiskinan	Persentase penduduk miskin / $\sum$ penduduk	%
	- Angka Pengangguran terbuka	$\frac{\text{Jmlh Pengangguran}}{\text{Jmlh Angkatan Kerja}} \times 100\%$	%
	- Perluasan kesempatan kerja	$\frac{\text{Penduduk yang bekerja}}{\text{Angkatan kerja}}$	
Meningkatnya cakupan layanan kesehatan	- Cakupan pelayanan kesehatan KK Miskin	$\frac{\sum \text{KK miskin yang dilayani}}{\sum \text{KK Miskin}} \times 100\%$	%
	- Umur Harapan Hidup	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Tahun
	- Angka kematian Ibu	$\frac{\text{D hamil}}{\text{JLH}} \times 1000$	
	- Angka Kematian Bayi	$\frac{\text{D0-1th}}{\sum \text{Lahir Hidup}} \times 1.000$	
	- Angka Kematian Balita	$\frac{\text{D0-59}}{\sum \text{Penduduk usia 0-59Bulan}} \times 1.000$	
	- Persentase gizi buruk	$\frac{\sum \text{balita gizi buruk}}{\sum \text{Balita}} \times 100\%$	%
Meningkatnya cakupan layanan sosial dasar	- Persentase Penduduk memiliki akta catatan sipil	$\frac{\sum \text{penduduk berakta}}{\sum \text{penduduk}} \times 100\%$	%
	- Laju Pertumbuhan Penduduk	$R = \frac{(Pt)}{P0} \times 100$	



Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Satuan
	- Rasio KDRT	Σ KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga	
	- Persentase PMKS	$\frac{\Sigma \text{PMKS}}{\Sigma \text{Penduduk}} \times 100\%$	%
	- Persentase penyelesaian kasus perselisihan di perusahaan	$\frac{\Sigma \text{Kasus Perselisihan Tertangani}}{\Sigma \text{kasus yang dilaporkan}} \times 100\%$	%
	- Jumlah Transmigran per tahun	Σ KK yang menjadi Transmigran dalam satu tahun	KK
Meningkatnya manajemen pendidikan, dan pariwisata	- Angka rata-rata lama sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yg diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. Banyaknya murid usia 7-12, 13-15, 16-18 th	
	- Angka Melek Huruf	$\frac{\Sigma \text{Penduduk usia 15th ke atas dapat baca tulis}}{\Sigma \text{Penduduk usia 15th ke atas}} \times 100$	
	- Jumlah pemustaka	Σ pengunjung yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan di Kabupaten Bangli	Orang
	- Persentase instansi pemerintah yang pengelolaan kearispannya mengacu pada peraturan perundang-undangan	$\frac{\Sigma \text{PD yang telah menerapkan arsip secara baku}}{\Sigma \text{PD}} \times 100\%$	%
	- Jumlah Kunjungan Wisata	Σ wisatawan mancanegara dan nusantara yang berkunjung ke Kab. Bangli	Orang



Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Satuan
Meningkatnya manajemen lingkungan	- Persentase Lingkungan Sehat	$\frac{\sum \text{lingkungan yang memenuhi syarat lingkungan sehat}}{\sum \text{Lingkungan}} \times 100\%$	%
	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKLH = (IPA \times 30\%) + (IPU \times 30\%) + (ITH \times 40\%)$	
	- Persentase Pengelolaan sampah	$\frac{\text{Volume sampah yang dikelola (m3)}}{\text{Volume produksi sampah (m3)}} \times 100\%$	%
Meningkatnya kelembagaan aparatur pemerintah	- Jumlah Produk Hukum Daerah yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Kepentingan Umum	$\sum \text{Produk Hukum yang diterbitkan}$	Produk hukum
	- Pelayanan administrasi kepegawaian sesuai SOP dan tepat waktu	$\sum \text{ASN yang terlayani sesuai SOP dan tepat waktu}$	Orang
	- Persentase pejabat yg telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	$\left(\frac{\sum \text{pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan}}{\sum \text{total pejabat PD yg ada}} \right) \times 100\%$	%
Meningkatnya kelembagaan Desa Dinas, Desa Pekraman dan Banjar Adat	- Persentase SDM Desa dan Banjar yang di BinteK	$\left(\frac{\sum \text{perangkat Desa yang dibinteK}}{\sum \text{perangkat Desa yang ada}} \right) \times 100\%$	%
	- Jumlah LPD kategori sehat	$\left(\frac{\sum \text{LPD yang aktif}}{\sum \text{LPD yang ada}} \right) \times 100\%$	LPD
	- Persentase Ormas yang aktif dalam penguatan persatuan dan kesatuan bangsa	$\left(\frac{\sum \text{Ormas yang terlibat}}{\sum \text{Ormas}} \right) \times 100\%$	%
	- Persentase organisasi generasi muda yang memahami tentang nasionalisme	$\left(\frac{\sum \text{organisasi muda yang dibina}}{\sum \text{organisasi muda}} \right) \times 100\%$	%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	- Persentase capaian kinerja Perangkat Daerah menjadi kategori B	$\left(\frac{\sum \text{nilai Laporan Kinerja PD yang bernilai B}}{\sum \text{PD yang membuat Laporan Kinerja}} \right) \times 100\%$	%
	- Persentase inovasi pelayanan publik	$\frac{\sum \text{PD berinovasi}}{\sum \text{PD}} \times 100\%$	%



Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Satuan
	- Persentase perangkat daerah yang melaporkan realisasi fisik kegiatan pembangunan tepat waktu	$\frac{\sum \text{PD yang melaporkan tepat waktu}}{\sum \text{PD}} \times 100\%$	%
	- Penyelesaian waktu perijinan	Penyelesaian proses perijinan tepat waktu	Hari
	- Opini BPK	Opini BPK	
	- Kesesuaian RPJMD dengan RKPD	$\frac{(\sum \text{program sesuai} / \sum \text{program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD})}{100\%} \times 100\%$	%
	- Persentase usulan musrenbang kecamatan yang diserap dalam dokumen RKPD	$\frac{\sum \text{usulan yang terserap}}{\sum \text{Usulan}} \times 100\%$	%
	- Persentase pengelolaan barang/jaasa dan aset	$\frac{\sum \text{aset yang sudah terkelola}}{\sum \text{aset}} \times 100\%$	%
	- Persentase perangkat daerah yang mendapat nilai >B hasil penilaian inspektorat	$\frac{(\sum \text{perangkat daerah yang mendapat nilai} > B)}{\sum \text{Perangkat Daerah}} \times 100\%$	%
	- Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	$\frac{(\sum \text{rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti di tahun yang bersangkutan} / \sum \text{akumulasi rekomendasi hasil pemeriksaan})}{100\%} \times 100\%$	%
	- Persentase ketepatan waktu penyampaian LPPD dan LKPJ Kepala daerah	$\frac{\sum \text{Laporan tepat waktu}}{\sum \text{Laporan}} \times 100\%$	%
	- Persentase Kegiatan Pemerintah Kabupaten Bangli yang dapat diakses publik	$\frac{\sum \text{kegiatan yang dipublikasikan}}{\sum \text{kegiatan}} \times 100\%$	%
Meningkatnya demokratisasi masyarakat Bangli	- Persentase pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	$\frac{\sum \text{pelanggaran PERDA dan PERKADA}}{\sum \text{Penduduk}} \times 100\%$	%
	- Penegakan PERDA dan Perkada	$\frac{\text{Jmlh penyelesaian penegakan PERDA}}{\text{Jmlh pelanggaran PERDA}} \times 100\%$	%



Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Formula	Satuan
	- Persentase masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu	$\frac{\sum \text{masyarakat Yang menggunakan hak suara}}{\sum \text{Pemilih}} \times 100\%$	%
Meningkatnya kinerja Koperasi, UMKM, Penanaman Modal, Perindustrian dan perdagangan	- Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	$\frac{\sum \text{Kontribusi PDRB dari sektor Industri}}{\sum \text{total PDRB}} \times 100\%$	%
	- Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	$\frac{\sum \text{Kontribusi PDRB dari sektor Perdagangan}}{\sum \text{total PDRB}} \times 100\%$	%
	- Pertumbuhan UMKM non BPR/LK UMKM	$\sum \text{UMKM non BPR/LK UMKM}$	UMKM
	- Persentase Koperasi aktif	$\frac{\sum \text{Koperasi aktif}}{\sum \text{Koperasi}} \times 100\%$	%
	- Peningkatan jumlah Investor	$\sum \text{Investor di Kabupaten Bangli}$	Investor
	- Jumlah peningkatan nilai investasi PMA dan PMDN skala nasional	$\text{Nilai Investasi PMA dan PMDN skala nasional}$	M
Meningkatnya nilai budaya dan kearifan lokal	- persentase pelestarian seni dan budaya	$\frac{\sum \text{Seni Budaya yang dilestarikan}}{\sum \text{Seni Budaya}} \times 100\%$	%
	- Persentase rangkaian upacara keagamaan yang dilaksanakan	$\frac{\sum \text{rangkaian upacara yang dilaksanakan}}{\sum \text{rangkaian Upacara}} \times 100\%$	%

2.1.6 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun



tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2020.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangli tahun 2020.

Tabel 2.4
Rencana Kinerja Tahunan.

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Rencana Kinerja Tahunan 2020
Meningkatnya prokduktivitas pertanian dan perikanan guna ketahanan pangan	Produksi Ikan per hektar (Ton)	Ton	3,71
	Produksi Daging (Ton)	Ton	3.926,17
	Persentase klp tani yang meningkat klas kemampuannya	%	50
	Persentase petani dengan pendapatan minimal 2 juta	%	50
	Persentase Produksi beras dikonsumsi Sendiri	%	71
	Persentase Pola Pangan Harapan (PPH)	%	88,60
	Produktivitas Tanaman Pangan Unggulan perhektar (Ton)	Ton	7,22
	Produktivitas Tanaman Hortikultura Unggulan perhektar (ton)	Ton	26,14



	Produktivitas Tanaman perkebunan Unggulan perhektar (ton)	Ton	0,82
	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi Baik	%	86
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa guna mendukung produktivitas perekonomian local	Persentase masyarakat desa dalam membangun Desa	%	97
	Persentase peningkatan jumlah LPD sehat	%	67,29
	Persentase Kelembagaan ekonomi pedesaan	%	65
Meningkatnya pendapatan asli daerah	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) per Tahun	%	15,20
	Jumlah PAD sektor pariwisata	Miliar	24
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar guna mendukung tata kelola Daya Tarik Wisata (DTW)	Persentase pengendalian ruang	%	82
	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	92
	Persentase Pembangunan jalan dan jembatan	%	92
	Persentase penduduk (RT/KK) yang mempunyai akses air Minum	%	96
Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan, komunikasi dan informatika guna mendukung tata kelola Daya Tarik Wisata (DTW)	Persentase Pelanggaran lalin	%	38
Menurunnya angka kemiskinan	Meningkatnya partisipasi angkatan Kerja	%	0,62
	Persentase KK/Masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki rumah layak huni	%	68
	Umur Harapan Hidup	TH	70,64



Meningkatnya cakupan layanan kesehatan	Persentase Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan RS	%	88,82
	Persentase Penduduk memiliki dokumen kependudukan dan capil	%	63,80
Meningkatnya cakupan layanan sosial dasar	Jumlah KDRT yg tertangani	%	100
	Persentase PUS yang menjadi peserta KB Aktif	%	1,06
	Persentase PMKS yg menerima jaminan Sosial	%	3,87
	Meningkatnya perlindungan ketenagakerjaan	%	3,06
	Meningkatnya jumlah transmigran	Kali	1
Meningkatnya manajemen pendidikan, dan pariwisata	Jumlah pemustaka	Ribu	1004
	Rata-rata lama sekolah		8,714
	Angka melek huruf		90,52
	APK PAUD		82,89
	Cakupan layanan Pendidikan 9 Tahun		78,58
	Cakupan layanan Pendidikan menengah		0
	Cakupan peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan	%	100
	Cakupan peningkatan mutu manajemen pelayanan pendidikan	%	99
	Jumlah Kunjungan Wisatawan domestic dan mancanegara ke Bangli	Jt	1,6
	Persentase pelanggaran lalin	%	38
	Persentase instansi pemerintah yang pengelolaan kearispannya mengacu pada peraturan perundang-Undangan	%	83,01
Meningkatnya manajemen Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		66,5-70,5



Meningkatnya kelembagaan aparatur pemerintah	Persentase pejabat yg telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	%	80
	Pelayanan administrasi kepegawaian sesuai SOP		11,838
	Persentase aparatur dan media yang Bekerjasama	%	19,94
	Persentase peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah	%	90
	Jumlah system pengadaan langsung yang kredibel	Opd	30
	Persentase Ormas yang aktif dalam penguatan persatuan dan kesatuan bangsa	%	92
Meningkatnya kelembagaan Desa Dinas, Desa Pekraman dan Banjar Adat	Jumlah desa yang meningkat kesadaran hukum dan HAMnya	desa	9
	Persentase kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan desa	%	99
	Pelayanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP	%	93
	Persentase ormas yang aktif dalam penguatan persatuan dan kesatuan bangsa	%	92
	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	%	90
Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai Pengamanan SPBE		Baik
	Nilai SPBE		Baik
	Nilai LPPD		Sangat tinggi



	Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan realisasi fisik dan keuangan kegiatan pembangunan tepat waktu		84
	Pemeringkatan PPID		1
	Prosentase peningkatan pengadaan barang/jasa	%	96,75
	Jumlah evaluasi dan laporan pengadaan barang/jasa	%	99
	Capaian IKM		4,6
	Persentase kesesuaian produk hukum daerah dengan peraturan perundang- perundang, kepentingan umum, kesusilaan dan Hak Asasi Manusia	%	100
	Indeks kepuasan masyarakat	%	0,85
	Persentase tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	%	99
	Persentase peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Publik	%	99
	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan Capil	%	64,80
	Meningkatnya Indeks kepuasan Anggota DPR terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD		81,80
	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	%	97
	Opini BPK		WTP
	Persentase Penanganan Bencana	%	80



	Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekontruksi	%	78
	Rasio Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	%	35
	Konsistensi Program RPJMD dengan RKPD	%	87
	Persentase Pemanfaatan dokumen perencanaan	%	82,5
	Persentase perangkat daerah yang mendapat nilai evaluasi > B	%	80
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang selesai ditindaklanjuti		89
	Level maturitas SPIP		level 3
	Level kapabilitas APIP		level 3
Meningkatnya demokratisasi masyarakat Bangli	Penegakan PERDA dan Perkada		86
Meningkatnya kinerja Koperasi, UMKM, Penanaman Modal, Perindustrian dan perdagangan	Meningkatnya kualitas koperasi		95,55
	Nilai investasi (Milyar)		116
	Peningkatan daya saing UMKM		24,76
	Persentase angka pertumbuhan unit usaha industri kecil	%	0,67
	Persentase sector industri terhadap PDRB	%	12,33
	kupan bina kelompok pengerajin	%	1,57



	Persentase kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB	%	12,56
	Ekspor bersih perdagangan	%	870.55 5.250
	Persentase desa adat yang lestari	%	3,49
Meningkatnya nilai budaya dan kearifan local	Persentase pengembangan seni dan budaya daerah	%	2,72
	Persentase rangkaian upacara keagamaan yang dilaksanakan	%	88
	Persentase cagar budaya yang lestari	%	2,5

2.1.7 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar revaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Adapun yang diperjanjikan Kepala Daerah



Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja
Sasaran Strategis 1
Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan guna
ketahanan pangan

NO	INDIKATOR SASARAN KINERJA	SATUAN	TARGET 2020
1	Produksi Ikan perhektar (Ton)	Ton	3.71
2	Produksi Daging (Ton)	Ton	3,926.17
3	Persentase klp tani yang meningkat klas kemampuannya	%	50
4	Persentase Petani dengan pendapatan minimal 2 juta	%	50
5	Persentase Produksi beras dikonsumsi sendiri	%	71
6	Persentase Pola pangan harapan (PPH)	%	88.60
7	Produktivitas Tanaman Pangan unggulan perhektar (Ton)	Ton	7.22
8	Produktivitas Tanaman Hortikultura Unggulan perhektar (Ton)	Ton	26.14
9	Produktivitas Tanaman perkebunan Unggulan perhektar (ton)	Ton	0.82
10	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	86

Sasaran Strategis 2
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa guna mendukung
produktivitas perekonomian local

NO	INDIKATOR SASARAN KINERJA	SATUAN	TARGET 2020
1	Persentase masyarakat desa dalam membangun desa	%	97
2	Persentase peningkatan jumlah LPD sehat	%	67,29
3	Persentase Kelembagaan ekonomi pedesaan	%	65



Meningkatnya pendapatan asli daerah

NO	INDIKATOR SASARAN KINERJA	SATUAN	TARGET 2020
1	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pertahun	%	15.20
2	Jumlah PAD sektor pariwisata	Miliar	24

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar guna mendukung tata kelola Daya Tarik Wisata (DTW)

NO	INDIKATOR SASARAN KINERJA	SATUAN	TARGET 2020
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	92
2	Persentase Pembangunan jalan dan jembatan	%	92
3	Persentase penduduk (RT/KK) yang mempunyai akses air minum	%	96

Sasaran Strategis 5

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan, komunikasi dan informatika guna mendukung tata kelola Daya Tarik Wisata (DTW)

NO	INDIKATOR SASARAN KINERJA	SATUAN	TARGET 2020
1	Persentase Pelanggaran lalin	%	38

Sasaran Strategis 6 Menurunnya angka kemiskinan

NO	INDIKATOR SASARAN KINERJA	SATUAN	TARGET 2020
1	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	%	0.62
2	Persentase KK/Masyarakat berpenghasirumah layak layak huni	%	68
3	Umur Harapan Hidup	TH	70.64



Sasaran Strategis 7
Meningkatnya cakupan layanan kesehatan

NO	INDIKATOR SASARAN KINERJA	SATUAN	TARGET 2020
1	Persentase Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan RS	%	88.82
2	Persentase Penduduk memiliki dokumen kependudukan dan capil	%	63.80

Sasaran Strategis 8
Meningkatnya cakupan layanan sosial dasar

NO	INDIKATOR SASARAN KINERJA	SATUAN	TARGET 2020
1	Jumlah KDRT yg tertangani	%	100.00
2	Persentase PUS yang menjadi peserta KB aktif	%	94.00
3	Persentase PMKS yg menerima jaminan social	%	21.00
4	Meningkatnya perlindungan ketenagakerjaan	%	47.06
5	Meningkatnya jumlah transmigran	Kali	1.00

Sasaran Strategis 9
Meningkatnya manajemen pendidikan, dan pariwisata

NO	INDIKATOR SASARAN KINERJA	SATUAN	TARGET 2020
1	Jumlah pemustaka	Org	1004 rb
2	Rata-rata lama sekolah	%	8.714
3	Angka melek huruf	%	90,52
4	APK PAUD	%	82,89
5	Cakupan layanan pendidikan 9 tahun	%	78,58
6	Cakupan peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan	%	100
7	Cakupan peningkatan mutu manajemen pelayanan pendikan	%	99
8	Jumlah Kunjungan Wisatawan domestic dan mancanegara ke Bangli	Jt	1.6 jt
9	Persentase instansi pemerintah yang pengelolaan kearispannya mengacu pada peraturan perundang-undangan	%	83.01



Sasaran Strategis 10
Meningkatnya manajemen Lingkungan

NO	INDIKATOR SASARAN KINERJA	SATUAN	TARGET 2020
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		68,5-70,5

Sasaran Strategis 11
Meningkatnya kelembagaan aparatur pemerintah

NO	INDIKATOR SASARAN KINERJA	SATUAN	TARGET 2020
1	Persentase pejabat yg telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	%	80
2	Pelayanan administrasi kepegawaian sesuai SOP		11,838
3	Persentase aparatur dan media yang bekerjasama	%	19.94
4	Persentase peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah	%	90
5	Jumlah system pengadaan langsung yang kredibel	Opd	30

Sasaran Strategis 12
Meningkatnya kelembagaan Desa Dinas, Desa Pekraman dan Banjar Adat

NO	INDIKATOR SASARAN KINERJA	SATUAN	TARGET 2020
1	Jumlah desa yang meningkat kesadaran hukum dan HAMnya	desa	9
2	Persentase ormas yang aktif dalam penguatan persatuan dan kesatuan bangsa	%	100



Sasaran Strategis 13
Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

NO	INDIKATOR SASARAN KINERJA	SATUAN	TARGET 2020
1	Nilai Pengamanan SPBE	%	Baik
2	Nilai SPBE	%	2.60
3	Nilai LPPD	%	Sangat tinggi
4	Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan realisasi fisik dan keuangan kegiatan pembangunan tepat waktu	%	90
5	Pemeringkatan PPID	%	peringkat 1
6	Prosentase peningkatan pengadaan barang/jasa	%	96.75
7	Jumlah evaluasi dan laporan pengadaan barang/jasa	%	99
8	Persentase kesesuaian produk hukum daerah dengan peraturan perundang- perundang, kepentingan umum, kesusilaan dan Hak Asasi Manusia	%	100
9	Indeks kepuasan masyarakat	%	0.85
10	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan capil	%	64,80
11	Meningkatnya Indeks kepuasan Anggota DPR terhadap Pelayanan Sekretariat DPR	%	81.80
12	Opini BPK		WTP
13	Persentase Penanganan Bencana	%	80
14	Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekontruksi	%	78
15	Rasio Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	%	35
16	Konsistensi Program RPJMD dengan RKPD	%	87
17	Persentase Pemanfaatan dokumen perencanaan	%	82,5
18	Persentase perangkat daerah yang mendapat nilai evaluasi lebih besar atau sama dengan B	%	80
19	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	%	89
20	Level maturitas SPIP	%	Level 3
21	Level Kapabilitas APIP	%	Level 3



Sasaran Strategis 14
Meningkatnya demokratisasi masyarakat Bangli

NO	INDIKATOR SASARAN KINERJA	SATUAN	TARGET 2020
1	Penegakan PERDA dan Perkada	%	86.00

Sasaran Strategis 15
Meningkatnya kinerja Koperasi, UMKM, Penanaman Modal,
Perindustrian dan perdagangan

NO	INDIKATOR SASARAN KINERJA	SATUAN	TARGET 2020
1	Meningkatnya kualitas koperasi	%	95.55
2	Nilai investasi (Milyar)	%	116
3	Peningkatan daya saing UMKM	%	24,76
4	Persentase angka pertumbuhan unit usaha industri kecil	%	0.67
5	Persentase sector industri terhadap PDRB	%	12,33
6	Cakupan bina kelompok pengerajin	%	1.57
7	Persentase kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB	%	12.56
8	Ekspor bersih perdagangan	Rp	870,555 5.250



Sasaran Strategis 16
Meningkatnya nilai budaya dan kearifan local

NO	INDIKATOR SASARAN KINERJA	SATUAN	TARGET 2020
1	Persentase desa adat yang lestari	%	3,49
2	Persentase pengembangan seni dan budaya daerah	%	2,72
3	Persentase rangkaian upacara keagamaan yang dilaksanakan	%	88
4	Persentase cagar budaya yang lestari	%	2,5

ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH (APBD)
KAB. BANGLI TAHUN 2020

Rp. 1.039.098.885.049,20



BAB III

Akuntabilitas Kinerja

3.1. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2020

Pemerintah Kabupaten Bangli sebagai pelayan Publik telah memiliki moto “Sewanam Paramo Dharmah” yang artinya melayani adalah kewajiban yang mulia, dimana kewajibannya sebagai pelayan masyarakat selalu dituntut untuk dapat mempertanggungjawabannya. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bangli disusun sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Permenpan RB No 3 tahun 2014 tentang e-Sakip reviu dan Tata cara penyampaian laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangli tahun 2016-2021. Yang disesuaikan dengan RPJMD Perubahan yang di amanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2019, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Bangli.



Mengacu pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangli berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Bangli.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali
2	100% s/d 75%	Baik
3	75% s/d 55%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Secara umum Pemerintah Kabupaten Bangli telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangli, yang disesuaikan dengan Perda Kabupaten Bangli Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan atas Perda nomor 8 tahun 2016 tentang rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah semesta berencana Kabupten Bangli tahun 2016-2021.



Dalam RPJMD Kabupaten Bangli terdapat 9 Misi, 10 Tujuan, 16 sasaran, dengan 79 indikator sasaran terdiri dari Misi I terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 12 indikator kinerja, Misi II terdapat 1 tujuan dan 1 sasaran dengan 2 indikator kinerja, Misi III terdapat 1 tujuan dan 2 sasaran dengan 4 indikator kinerja, Misi IV terdapat 1 tujuan dan 3 sasaran dengan 10 indikator kinerja, Misi V terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dengan 10 indikator Kinerja, Misi VI terdapat 1 Tujuan, 2 Sasaran, dengan 7 indikator kinerja, Misi VII terdapat 2 Tujuan, 2 Sasaran dengan 22 Indikator, Misi VIII terdapat 1 Tujuan 1 Sasaran dengan 8 Indikator dan Misi IX terdapat 1 Tujuan, 1 Sasaran dan 4 indikator kinerja. Dari 16 sasaran dengan 79 indikator kinerja.

Mengacu pada Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang RPJMD semesta Berencana kabupaten Bangli tahun 2016-2021 maka sasaran dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

Misi I terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 12 indikator kinerja;

Misi II terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 2 indikator kinerja;

Misi III terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator kinerja;

Misi IV terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 10 indikator kinerja;

Misi V terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 10 indikator kinerja.

Misi VI terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 7 indikator kinerja

Misi VII terdapat 2 tujuan, 2 sasaran dan 22 indikator kinerja

Misi VIII terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 8 indikator kinerja

Misi IX terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 4 indikator kinerja

(10 tujuan, 16 sasaran strategis dan 79 Indikator Kinerja Sasaran)



Tabel 3.1.1

Pencapaian Indikator Sasaran

No	Misi	Jumlah Tujuan	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja sasaran	Pencapaian Indikator Sasaran				
					BS	B	C	K	NBK
1	Misi 1	1	2	12	3	7	2		
2	Misi 2	1	1	2				2	
3	Misi 3	1	2	4	1		3		
4	Misi 4	1	3	10	5	3	1	1	
5	Misi 5	1	2	10	3	6		1	
6	Misi 6	1	2	7	3	3		1	
7	Misi 7	2	2	22	6	12	1		3
8	Misi 8	1	1	8	3	1	3	1	
9	Misi 9	1	1	4		1	1	2	
Jumlah		10	16	79	24	33	11	8	3

Tabel 3.1.2

Presentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Presentase
Misi I (12 Indikator Sasaran)			
1	Baik Sekali	3	25,00
2	Baik	7	58,33
3	Cukup	2	16,67
4	Kurang		
5	Nilai Belum Keluar		
	Jumlah	12	100.00
Misi II (2 Indikator Sasaran)			
1	Baik Sekali		
2	Baik		
3	Cukup		
4	Kurang	2	100
5	Nilai Belum Keluar		
	Jumlah	2	100



Misi III (4 Indikator Sasaran)			
1	Baik Sekali	1	25
2	Baik		
3	Cukup		
4	Kurang	3	75
5	Nilai Belum Keluar		
	Jumlah	4	100
Misi IV (10 Indikator Sasaran)			
1	Baik Sekali	5	50
2	Baik	3	30
3	Cukup	1	10
4	Kurang	1	10
5	Nilai Belum Keluar		
	Jumlah	10	100

Misi V (10 Indikator Sasaran)			
1	Baik Sekali	3	30
2	Baik	6	60
3	Cukup		
4	Kurang	1	10
5	Nilai Belum Keluar		
	Jumlah	10	100

Misi VI (7 Indikator Sasaran)			
1	Baik Sekali	3	42,86
2	Baik	3	42,86
3	Cukup		
4	Kurang	1	14.29
5	Nilai Belum Keluar		
	Jumlah	7	100

Misi VII (22 Indikator Sasaran)			
1	Baik Sekali	6	27.27
2	Baik	12	54,55
3	Cukup	1	4,55
4	Kurang		
5	Nilai Belum Keluar	3	13.64
	Jumlah	22	100.00



Misi VIII (8 Indikator Sasaran)			
1	Baik Sekali	3	37,50
2	Baik	1	12,50
3	Cukup	3	37,50
4	Kurang	1	12,50
5	Nilai Belum Keluar		
	Jumlah	8	100.00

Misi IX (4 Indikator Sasaran)			
1	Baik Sekali	1	25.00
2	Baik	1	25.00
3	Cukup		
4	Kurang	2	50.00
5	Nilai Belum Keluar		
	Jumlah	4	100.00

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 16 sasaran yang mencakup 79 indikator sasaran, di ketahui bahwa 24 indikator sasaran atau 30,9% baik sekali. 41,77% indikator sasaran atau 41,77% Baik, 11 indikator sasaran atau 13,92% Cukup, 8 indikator sasaran atau 10% Kurang dan 3 indikator sasaran atau 3,8% belum direlis. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 88,86% atau bermakna Baik,

Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bangli pada tahun 2020 dengan predikat Baik.

3.2. Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2020

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :



Tabel. 3.2.1
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1
Meningkatnya produktivitas pertanian dan perikanan guna ketahanan pangan

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2019		capaian kinerja 2019 (%)	Tahun 2020		capaian kinerja 2020 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Produksi Ikan perhektar (Ton)	Ton	3.69	3.80	102.98	4.901,10	4.917,37	100,33
2	Produksi Daging (Ton)	Ton	3,836.17	3,761.39	98.05	3.836,17	3.157,97	82,32
3	Persentase klp tani yang meningkat kelas kemampuannya	%	40.00	50.20	125.50	50,00	50,00	100,00
4	Persentase Petani dengan pendapatan minimal 2 juta	%	40.00	40.00	100.00	50,00	50,00	100,00
5	Persentase Produksi beras dikonsumsi sendiri	%	69.00	70.00	101.45	71,00	61,18	86,17
6	Persentase Pola pangan harapan (PPH)	%	88.50	92.85	104.92	88,60	94,80	107,00
7	Produktivitas Tanaman Pangan unggulan perhektar (Ton)	Ton	7.11	6.91	97.19	7,22	7,82	108,31
8	Produktivitas Tanaman Hortikultura Unggulan perhektar (Ton)	Ton	25.73	20.70	80.45	26,14	22,19	84,89
9	Produktivitas Tanaman perkebunan Unggulan perhektar (ton)	Ton	0.77	1.16	150.65	0,82	0,72	87,80
10	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	73.00	46.92	64.27	86,00	46,29	53,83
Rata-rata Capaian Kinerja			Jumlah		102.55			91,06



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 10 indikator sasaran Meningkatnya Produktivitas Pertanian dan Perikanan Guna Ketahanan Pangan, 3 indikator sasaran atau 30.00% melampaui target diatas 100% kategori sangat Baik. dan 6 indikator sasaran Atau 60,00% kategori Baik, serta 1 indikator sasaran atau 10% kategori kurang dengan rata-rata capaian kinerja mencapai 91,06% dengan kategori baik. Jadi kalau dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2020 mengalami penurunan akibat Pandemic covid 19.

Tabel. 3.2.2
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa guna mendukung produktivitas perekonomian local

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2019		capaian kinerja 2019 (%)	Tahun 2020		capaian kinerja 2020 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
2	Persentase peningkatan jumlah LPD sehat	%	65.41	65.41	100.00	67,29	67,29	100,00
3	Persentase Kelembagaan ekonomi pedesaan	%	45.00	45.00	100.00	96,00	64,00	66,67
Rata-rata Capaian Kinerja					100			83,33

Dari Tabel 3.2.2 diatas 2 Indikator sasaran meningkatnya Pemberdayaan masyarakat desa guna mendukung produktivitas perekonomian lokal, 1 indikator sasaran telah mencapai target sebesar 50% dengan kategori Baik, 1 indikator sasaran Capaian Kinerjanya sebesar 50% dengan kategori cukup , Rata-rata capaian kinerja tahun 2020 sebesar 83,33 % dengan kategori Baik, maka dibandingkan Capaian Kinerja Tahun 2019 mengalami penurunan.



Tabel 3.2.3
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3
Meningkatnya pendapatan asli daerah

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2019		capaian kinerja 2019 (%)	Tahun 2020		capaian kinerja 2020 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pertahun	%	15.20	3.60	23.68	15,20	5,09	33,49
2	Jumlah PAD sektor pariwisata	Miliar	23.50	31.65	134.68	41,07	7,51	18,29
Rata-rata Capaian Kinerja					79,18			25,89

Dari Tabel diatas 2 indikator sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, sasaran Realisasinya jauh dibawah target dengan Capaian Kinerja dengan rata-rata 25,89%.

Tabel 3.2.4
Sasaran Strategis 4
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur dasar guna mendukung tata kelola Daya Tarik Wisata (DTW)

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2019		capaian kinerja 2019 (%)	Tahun 2020		capaian kinerja 2020 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	%	75.00	56.60	75.47	92,00	63,41	68,92
2	Persentase Pembangunan jalan dan jembatan	%	72.00	0.00	0.00	92,00	54,60	59,35



3	Persentase penduduk (RT/KK) yang mempunyai akses air minum	%	91.00	64.25	70.60	96,00	67,27	70,07
Rata-rata Capaian Kinerja					73,04			66,11

Dari Tabel diatas 3 indikator sasaran Meningkatnya Ketersediaan infrastruktur dasar guna mendukung tata kelola ojek wisata, indikator 1 kategori baik , 2 indikator mencapai kategori cukup.

Rata-rata Capaian Kinerja tahun 2020 sebesar 66,11 dengan kategori cukup hal ini disebabkan karena adanya refocusing anggaran.

Tabel 3.2.5
Sasaran Strategis 5

Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan, komunikasi dan informatika guna mendukung tata kelola Daya Tarik Wisata (DTW)

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2019		capaian kinerja 2019 (%)	Tahun 2020		capaian kinerja 2020 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Pelanggaran lalin	%	40.00	40.49	101.23	38,00	38,17	100,45
Rata-rata Capaian Kinerja					101,23			100,45

Dari Tabel diatas 1 indikator sasaran Meningkatnya Ketersediaan sarana dan prasarana Perhubungan, Kemonikasi dan informatika guna mendukung tata kelola daya tarik wisata, indikator 1 Presentase Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas menunjukkan penurunan hal ini ditunjukan dengan capaian kinerja sebesar 100,45% menunjukkan Baik sekali.



Tabel 3.2.6
Sasaran Strategis 6
Menurunnya angka kemiskinan

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2019		capaian kinerja 2019 (%)	Tahun 2020		capaian kinerja 2020 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	%	0.63	1.18	187,30	0,62	0,73	117,74
2	Persentase KK/Masyarakat berpenghasirumah layak layak huni	%	41.00	17,84	43,51	68,00	34,41	50,60
3	Umur Harapan Hidup	TH	70.25	70,37	100,17	70,50	70,52	100,03
Rata-rata Capaian Kinerja					110,33			134,19

Dari Tabel diatas dapat di ketahui bahwa 3 indikator sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan 2 Indikator sasaran capaian kinerjanya sebesar 66,67 dengan kategori sangat baik dan 1 indikator Capaian kinerja belum direlis namun rata-rata Capaian kinerja tahun 2020 sebesar 108,89% dengan kategori baik sekali.

Tabel 3.2.7
Sasaran Strategis 7
Meningkatnya cakupan layanan kesehatan

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2019		capaian kinerja 2019 (%)	Tahun 2020		capaian kinerja 2020 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan RS	%	88.81	88.02	99.11	88,82	89,86	101,17
2	Persentase Penduduk memiliki dokumen kependudukan dan capil	%	60.80	60.63	99.72	63,80	66,19	103,75
Rata-rata Capaian Kinerja					99,42			102,46



Dari Tabel diatas dapat di ketahui bahwa 2 indikator sasaran Meningkatnya Cakupan Layanan Kesehatan 2 indikator capaian Kinerja dengan kondisi sangat baik dibandingkan dengan tahun lalu capaian kinerja meningkat.

Tabel 3.2.8
Sasaran Strategis 8
Meningkatnya cakupan layanan sosial dasar

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2019		capaian kinerja 2019 (%)	Tahun 2020		capaian kinerja 2020 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Jumlah KDRT yg tertangani	%	100.00	100.00	100.00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase PUS yang menjadi peserta KB aktif	%	94.00	85.90	91.38	56,82	86,10	151,53
3	Persentase PMKS yg menerima jaminan social	%	21.00	22.00	104.76	0,30	0,25	83,33
4	Meningkatnya perlindungan ketenagakerjaan	%	47.06	43.83	93.14	48,10	43,83	91,12
5	Meningkatnya jumlah transmigran	Kali	1.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00
Rata-rata Capaian Kinerja					77,86			85,20

Dari Tabel diatas 5 Indikator Sasaran Meningkatnya Cakupan Layanan Sosial Dasar indikator 1 kategori Baik sekali dan Indikator 3 capaian kinerja baik. Dan Indikator meningkatnya jumlah transmigran capaian kinerja nihil.

Jadi rata-rata capaian kinerja tahun 2020 sebesar 85,20%, dibandingkan tahun sebelumnya meningkat namun masih dalam kategori baik.



Tabel 3.2.9
Sasaran Strategis 9
Meningkatnya manajemen pendidikan, dan pariwisata

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2019		capaian kinerja 2019 (%)	Tahun 2020		capaian kinerja 2020 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Jumlah pemustaka	Org	6,000.00	4,780.00	79.67	1.004.000,00	1.046.125,00	104,20
2	Rata-rata lama sekolah	%	8.30	7.38	88.92	8,71	8,11	93,07
3	Angka melek huruf	%	89.19	88.75	99.51	90,52	87,92	97,13
4	APK PAUD	%	74.94	92.28	123.14	82,89	88,03	106,20
5	Cakupan layanan pendidikan 9 tahun	%	76.78	67.37	87.74	78,58	68,86	87,63
6	Cakupan peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan	%	99.00	89.72	90.63	100,00	98,12	98,12
7	Cakupan peningkatan mutu manajemen pelayanan pendidikan	%	97.00	73.36	75.63	100,00	87,65	87,65
8	Jumlah Kunjungan Wisatawan domestic dan mancanegara ke Bangli	Jt	1.50	2.13	142.00	1.600.000,00	280.561,00	17,54
9	Persentase instansi pemerintah yang pengelolaan kearispannya mengacu pada peraturan perundang-undangan	%	66.41	73.33	110.42	83,01	86,67	104,41
Rata-rata Capaian Kinerja					99.74			88,44



Dari tabel diatas dapat di ketahui bahwa 9 indikator sasaran Meningkatnya managemen Pendidikan dan Pariwisata menunjukan 3 indikator sasaran Baik sekali, dan 5 indikator sasaran Baik dan 1 indikator sasaran kurang dengan rata rata capaian kinerja tahun 2020 sebesar 88,44 dengan kategori baik.

Tabel 3.2.10
Sasaran Strategis 10
Meningkatnya manajemen Lingkungan

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2019		capaian kinerja 2019 (%)	Tahun 2020		capaian kinerja 2020 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		66,5-68,5	65.13	97.72	68,5-70,5	60,02	87,62
Rata-rata Capaian Kinerja					97,72			87,62

Dari tabel diatas dapat di ketahui bahwa 1 indikator sasaran Meningkatnya manajemen Lingkungan, sasaran indeks lingkungan Hidup capaian kinerja tahun 2020 sebesar 87,62 dengan kategori Baik.



Tabel 3.2.11
Sasaran Strategis 11
Meningkatnya kelembagaan aparatur pemerintah

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2019		capaian kinerja 2019 (%)	Tahun 2020		capaian kinerja 2020(%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase pejabat yg telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	%	70.00	42.00	60.00	80,00	0,00	0,00
2	Pelayanan administrasi kepegawaian sesuai SOP		11,738.00	13,132.00	111.88	11.838,00	13.669,00	115,47
3	Persentase aparatur dan media yang bekerjasama	%	19.94	19.94	100.00	19,94	19,94	100,00
4	Persentase peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah	%	86.00	87.00	101.16	97,00	98,00	101,03
5	Jumlah system pengadaan langsung yang kredibel	Opd	30.00	30.00	100.00	75,00	97,87	130,49
Rata-rata Capaian Kinerja					100,39			89,40

Dari Tabel diatas dapat di ketahui bahwa 5 indikator sasaran meningkatnya kelembagaan aparatur pemerintah 3 indikator capaian kinerjanya kategori Baik sekali dan 1 indikator sasaran dengan kategori baik dan satu capaian kinerja dengan kategori Cukup.

Jadi rata-rata capaian kinerja tahun 2020 sebesar 89,40 dengan kategori Baik.



Tabel 3.2.12
 Sasaran Strategis 12
 Meningkatnya kelembagaan Desa Dinas, Desa Pekraman dan Banjar Adat

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2019		capaian kinerja 2019 (%)	Tahun 2020		capaian kinerja 2020 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Jumlah desa yang meningkat kesadaran hukum dan HAMnya	desa	9.00	9.00	100.00	9,00	9,00	100,00
2	Persentase ormas yang aktif dalam penguatan persatuan dan kesatuan bangsa	%	90.00	90.00	100.00	92,00	92,00	100,00
Rata-rata Capaian Kinerja					100.00			100,00

Dari Tabel diatas 2 indikator sasaran Meningkatnya Kelembagaan Desa Dinas, Desa Pakraman dan Banjar Adat, 2 indikator sasaran dengan Presentase rata rata capaian kinerja tahun 2020 sebesar 100% kategori baik.

Tabel 3.2.13
 Sasaran Strategis 13
 Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2019		capaian kinerja 2019 (%)	Tahun 2020		capaian kinerja 2020 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai Pengamanan SPBE	%	Baik	belum direlis	0,00	baik	belum	0,00



							realis	
2	Nilai SPBE	%	2.60	belum direlis	105,34	2,06	belum dirilis	belum direlis
3	Nilai LPPD	%	Tinggi	Tinggi	100,00	tinggi	tinggi	100,00
4	Persentase Perangkat Daerah yang melaporkan realisasi fisik dan keuangan kegiatan pembangunan tepat waktu	%	78.00	83.00	106,41	100,00	100,00	100,00
5	Pemeringkatan PPID	%	peringkat 2	peringkat 4	50,00	peringkat 2	nihil	Nihil
6	Prosentase peningkatan pengadaan barang/jasa	%	96.50	90.89	94,19	96,75	97,98	101,27
7	Jumlah evaluasi dan laporan pengadaan barang/jasa	%	98.00	99.73	101,77	99,00	98,88	99,88
8	Persentase kesesuaian produk hukum daerah dengan peraturan perundang-perundang, kepentingan umum, kesusilaan dan Hak Asasi Manusia	%	100.00	100.00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Indeks kepuasan masyarakat	%	0.84	0.84	100,44	85,00	85,00	100,00
10	Persentase Penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan capil	%	60.80	60.63	99,72	63,80	66,19	103,75
11	Meningkatnya Indeks kepuasan Anggota DPR terhadap Pelayanan Sekretariat DPR	%	81,55	83.33	102,18	81,80	90,00	110,02
12	Opini BPK		WTP	WTP	100,00	WTP	WTP	100,00



13	Persentase Penanganan Bencana	%	57.00	100.00	175,44	66,00	75,00	113,64
14	Persentase Penanganan Rehabilitasi dan Rekontruksi	%	56.00	97.00	173,21	71,00	50,00	70,42
15	Rasio Peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	%	23.00	13.00	56,52	35,00	100,00	285,71
16	Konsistensi Program RPJMD dengan RKPD	%	85.00	67.78	79,74	87,00	92,78	106,64
17	Persentase Pemanfaatan dokumen perencanaan	%	63.75	55.00	86,27	82,50	82,50	100,00
18	Persentase perangkat daerah yang mendapat nilai evaluasi >= B	%	60.00	67.00	111,67	70,00	70,00	100,00
19	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang selesai ditindaklanjuti	%	83.00	96.23	115,94	86,00	100,00	116,28
20	Level maturitas SPIP		60	60	100,00	60,00	60,00	100,00
21	Level Kapabilitas APIP		60	40	67,00	60,00	40,00	66,67
Rata-rata Capaian Kinerja					96,,47			94,01

Dari Tabel diatas 21 Indikator sasaran meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah Rata rata capaian kinerja tahun 2020 menurun dari tahun lalu namun demikian prosentase capaian masih dalam kategori Baik.



Tabel 3.2.14
Sasaran Strategis 14
Meningkatnya demokratisasi masyarakat Bangli

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2019		capaian kinerja 2019 (%)	Tahun 2020		capaian kinerja 2020 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Penegakan PERDA dan Perkada		96.00	68.00	70,83	96,00	96,00	100,00
Rata-rata Capaian Kinerja					70,83			100,00

Dari Tabel diatas diketahui bahwa 1 indikator sasaran Meningkatkan Demokratisasi Masyarakat Bangli presentase Penegakan Perda dan Perkada capaian Kinerja 100% dengan kategori Baik .

Tabel 3.2.15
Sasaran Strategis 15
Meningkatnya kinerja Koperasi, UMKM, Penanaman Modal, Perindustrian dan perdagangan

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2019		capaian kinerja 2019 (%)	Tahun 2020		capaian kinerja 2020 (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Meningkatnya kualitas koperasi	%	91,84	90,17	98,18	92,70	82,63	89,14
2	Nilai investasi (Milyar)	%	113,00	133,05	117,74	116,00	324,46	279,71
3	Peningkatan daya saing UMKM	%	23,22	12,69	54,65	24,76	12,80	51,70



4	Persentase angka pertumbuhan unit usaha industri kecil	%	0,67	2,63	392,54	0,67	0,45	67,16
5	Persentase sector industri terhadap PDRB	%	11,83	9,70	81,99	12,33	6,03	48,91
6	Cakupan bina kelompok pengerajin	%	1,53	2,20	143,79	1,57	3,99	254,14
7	Persentase kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB	%	12,06	10,47	86,82	12,56	8,56	68,15
8	Ekspor bersih perdagangan	Rp	870.55 5.250,0 0	1.718.591 .656,00	197,41	870.555.2 50,00	1.019.017.8 00,00	117,05
Rata-rata Capaian Kinerja					146,64			121,99

Dari Tabel diatas di ketahui 8 indikator sasaran Meningkatnya Kinerja Koperasi, UMKM, Penanaman Modal, Perindustrian dan perdagangan. Bahwa seluruh indikator Sasaran melampaui target dengan capaian kinerja raat-rata 121.99 berkategori baik sekali.



Tabel 3.2.16
Sasaran Strategis 16
Meningkatnya nilai budaya dan kearifan local

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2019		capaian kinerja 2019 (%)	Tahun 2020		capaian kinerja 2020 (%)
			Target	Realisa si		Target	Realisa si	
1	Persentase desa adat yang lestari	%	3,61	3,00	83,10	3,49	1,00	28,65
2	Persentase pengembangan seni dan budaya daerah	%	2,72	5,00	183,00	2,72	2,00	73,53
3	Persentase rangkaian upacara keagamaan yang dilaksanakan	%	86,00	86,00	100,00	86,00	55,00	63,95
4	Persentase cagar budaya yang lestari	%	2,5	0,00	0,00	2,50	1,00	40,00
Rata-rata Capaian Kinerja					91,53			51,53

Dari Tabel diatas 4 Indikator sasaran meningkatnya nilai Budaya dan kearifan lokal indikator sasaran tidak mencapai target dengan capain kinerja rata-rata sebesar 51,53% dengan kategori cukup, hal ini disebabkan dengan adanya refocusing anggaran akibat pandemi covid 19.



3.3 Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2020.

Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Berpedoman pada proyeksi indikator makro ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi-strategi kebijakan fiskal sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangli Tahun 2016–2021 diarahkan kepada :

1. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari sumber sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan;
2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi belanja;
3. Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan strategi kebijakan fiskal tersebut di atas, maka kebijakan umum keuangan/anggaran RPJMD Kabupaten Bangli 2016-2021 diarahkan dalam tiga fungsi utama, yaitu : fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.



- Fungsi alokasi, yaitu penganggaran untuk kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat/swasta karena bersifat publik services seperti penanganan prasarana dasar dan penyediaan infrastruktur;
- Fungsi distribusi, yaitu penganggaran diarahkan untuk pemerataan, keadilan sosial, dan mengurangi kesenjangan, yang antara lain meliputi penanganan masalah kemiskinan pengembangan wilayah tertinggal dan lainnya;
- Fungsi stabilitasi, yaitu penganggaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban.

Selanjutnya Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2020, sebesar Rp, 1.039.098.885.049,20 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3,1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintahan Kabupaten Bangli untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
PENDAPATAN - LRA	1.039.098.885.049,20	1.012.111.114.390,05	97,40	1.180.012.548.084,92
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA				
Pendapatan Pajak Daerah - LRA Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	104.796.184.853,95	104.325.150.581,89	99,55	127.040.435.750,90
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	15.343.694.686,00	20.541.596.069,51	133,88	22.363.776.338,14
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	11.502.983.000,00	11.948.450.442,01	103,87	36.425.214.880,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA Bagi Hasil Pajak - LRA	5.449.766.367,95	7.089.522.902,70	130,09	6.139.575.904,28
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	72.499.740.800,00	64.745.581.167,67	89,30	62.111.868.628,48
Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	900.562.800.195,25	873.872.461.638,16	97,04	1.012.631.616.334,02
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA Dana Penyesuaian - LRA	663.309.137.964,00	655.274.340.282,00	98,79	717.603.942.304,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	15.653.003.814,00	18.601.283.546,00	118,84	13.146.775.181,00
Bantuan Keuangan - LRA	814,00	788.276.289,00	47,84	590.155.800,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	1.647.661.150,00	535.235.046.000,00	99,49	584.470.785.000,00
Lainnya - LRA Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LRA	538.001.454.000,00	100.649.734.447,00	93,19	119.396.226.323,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH -	108.007.019.000,00			



LRA	116.220.164.000,00	116.220.164.000,00	100,00	104.233.323.000,00
Pendapatan Hibah - LRA				
BELANJA	116.220.164.000,00	116.220.164.000,00	100,00	104.233.323.000,00
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	99.497.245.531,25	82.539.408.115,16	82,96	102.144.468.664,02
Belanja Barang dan Jasa Belanja Hibah				
Belanja Bantuan Sosial	99.497.245.531,25	82.539.408.115,16	82,96	102.144.468.664,02
BELANJA MODAL				
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal	21.536.252.700,00	19.838.549.241,00	92,12	88.649.882.366,00
Gedung dan Bangunan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	21.536.252.700,00 0,00	19.838.549.241,00 0,00	92,12 0,00	34.746.559.083,00 53.903.323.283,00
	33.739.900.000,00	33.913.502.170,00	100,51	40.340.496.000,00
	33.739.900.000,00	33.913.502.170,00	100,51	40.340.496.000,00
	934.890.580.941,41	845.706.694.909,93	90,46	951.781.204.550,25
	799.299.335.330,44	757.959.587.521,69	94,83	800.516.855.858,28
	548.107.476.923,23 209.012.768.407,21 41.998.890.000,00 180.200.000,00	531.600.679.857,32 184.852.123.000,37 41.326.584.664,00 180.200.000,00	96,99 88,44 98,40 100,00	562.942.381.763,46 218.885.526.142,82 18.346.147.952,00 342.800.000,00
	71.915.463.610,97	57.141.114.023,90	79,46	151.264.348.691,97
	24.802.624. 566,90 16.819.622.519,00 27.903.216.525,07	20.805.708.93 9,00 13.771.387.963,43 20.174.998.481,47	83,89 81,88 72,30	25.943.799.096,63 17.359.018.735,61 105.696.448.644,73
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.390.000.000,00	2.389.018.640,00	99,96	2.265.082.215,00
BELANJA TAK TERDUGA				
Belanja Tak Terduga	63.675.782.000,00	30.605.993.364,34	48,07	0,00
TRANSFER	63.675.782.000,00	30.605.993.364,34	48,07	0,00
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN				
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	161.125.819.257,71	158.210.966.678,00	98,19	209.250.444.570,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	3.809.699.853,71	3.792.032.485,00	99,54	5.759.778.770,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.534.369.468,60	1.528.712.600,00	99,63	2.022.171.700,00
PEMBIAYAAN	2.275.330.385,11	2.263.319.885,00	99,47	3.737.607.070,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penggunaan SILPA	157.316.119.404,00	154.418.934.193,00	98,16	203.490.665.800,00
	156.543.652.166,00	153.646.466.955,00	98,15	202.789.849.300,00
	772.467.238,00	772.467.238,00	100,00	700.816.500,00
	(56.917.515.149,92)	8.193.452.802,12	(14,40)	18.980.898.964,67
	56.917.515.149,92	56.919.478.338,74	100,00	37.936.616.185,25
	56.917.515.149,92	56.919.478.338,74	100,00	37.936.616.185,25
	56.917.515.149,92	56.919.478.338,74	100,00	37.936.616.185,25
	0,00	65.112.931.140,86	0,00	56.917.515.149,92
	56.917.515.149,92	56.919.478.338,74	100,00	37.936.616.185,25
	56.917.515.149,92	56.919.478.338,74	100,00	37.936.616.185,25
	56.917.515.149,92	56.919.478.338,74	100,00	37.936.616.185,25
SURPLUS / (DEFISIT)				
PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	65.112.931.140,86	0,00	56.917.515.149,92



BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangli Tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Bangli telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya.

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 16 sasaran yang mencakup 79 indikator sasaran, di ketahui bahwa 24 indikator sasaran atau 30,9% baik sekali. 41,77% indikator sasaran atau 41,77% Baik, 11 indikator sasaran atau 13,92% Cukup, 8 indikator sasaran atau 10% Kurang dan 3 indikator sasaran atau 3,8% belum direlis. Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 88,86% atau bermakna Baik,

Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bangli pada tahun 2020 dengan predikat Baik, kalau dibandingkan dari capaian kinerja tahun 2019 mengalami penurunan, hal ini disebabkan dengan situasi dan kondisi Covid 19 yang berakibat adanya refocusing anggaran, walau demikian perlu adanya upaya rencana aksi terhadap indikator kinerja berdasarkan skala prioritas yang mendukung capaian kinerja Kabupaten Bangli yang lebih baik.

Sekian dan Terimakasih,



